

Research article

Simbolisme Ritual dan Legitimasi Kepemimpinan Adat: Kajian Etnografi Tradisi Munirin Reje Masyarakat Gayo Aceh Timur, Indonesia

Ritual Symbolism and Traditional Leadership Legitimacy: An Ethnographic Study on the Munirin Reje Tradition of the Gayo Community in East Aceh, Indonesia

Ahmad Nubli Gadeng^{1*}, Asiah², Daska Azis³, Ruliani⁴, Ramli⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

* ahmadnubli@usk.ac.id

Abstract This study explores *Munirin Reje*, a sacred purification and inauguration ritual practiced by the minority Gayo ethnic community in Simpang Jernih, East Aceh, Indonesia. The tradition plays a pivotal role in legitimizing customary leadership (*Reje*) and reinforcing social cohesion within the framework of local ethno-governance. Employing a qualitative micro-ethnographic approach, data were collected through participant observation, in-depth interviews, including with customary elders, and artifact analysis. The findings indicate that the ritual serves as a multidimensional instrument of political legitimacy and moral accountability. The symbolic use of water and *peusijuek* acts as a spiritual cleansing that elevates the *Reje*'s moral authority. Importantly, the study highlights a crucial gendered mechanism of check-and-balance: the *Bines* dance performed by women serves as a platform for bottom-up social control, conveying constructive political criticism and advice through oral poetry prior to the leader's inauguration. Furthermore, genealogical knowledge transmission (*Muyang-Datu-Awan-Ama*) ensures the historical continuity of indigenous governance. The paper concludes that *Munirin Reje* is not merely a static ceremony, but a dynamic system of indigenous political ethics. To ensure its sustainability, the study recommends embedding its cultural values into inter-generational active participation and supporting its practice through local village development funds.

Keywords East Aceh; Ethno-Government; Gayo Community; Leadership Legitimacy; Munirin Reje; Symbolic Meaning.

Article history Submitted: 28/06/2025; revised: 25/06/2026; accepted: 30/06/2026.



© 2026 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman tradisi dan tatanan tata kelola pemerintahan lokal yang khas di setiap daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan kebudayaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, arus modernisasi, urbanisasi, dan dinamika pembangunan di Aceh belakangan ini mengindikasikan gejala pengerosan nilai-nilai kultural yang secara perlahan menjauhkan masyarakat dari akar tradisi. Akibatnya, ruang publik dan tatanan kemasyarakatan yang kian modern berisiko kehilangan sentuhan nilai-nilai lokal. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya kearifan lokal tergerus dan terancam punah di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta perubahan sosial apabila tidak dirawat secara berkelanjutan.

Salah satu dimensi mendasar dari kearifan lokal adalah sistem kemasyarakatan, yang mencakup: 1) keluarga dan kekerabatan, 2) sistem kesatuan hidup setempat, 3) organisasi atau perkumpulan (politik maupun nonpolitik), dan 4) sistem kenegaraan (Koentjaraningrat, 2009; Digdoyo, 2015). Dalam bingkai ini, etno-pemerintahan (*ethno-government*) hadir sebagai bagian integral dari kearifan lokal yang beroperasi pada aspek organisasi kemasyarakatan dan tata kelola kekuasaan lokal. Sebagai salah satu pendekatan dalam antropologi politik, *ethno-government* berfokus pada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang terikat erat dengan nilai-nilai budaya dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif kontemporer, pemerintahan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sistem administratif formal yang kaku, berorientasi birokrasi, dan berbasis pada regulasi negara semata. Lebih dari itu, pemerintahan merupakan sistem sosial-kultural yang tumbuh dari interaksi nilai, norma, simbol, dan praktik budaya lokal yang hidup di tengah komunitas. Dalam konteks pemerintahan lokal, kearifan budaya memegang peranan krusial dalam membentuk legitimasi kekuasaan, pola kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan masyarakat. Praktik-praktik tradisional yang diakui secara kolektif berfungsi sebagai instrumen penguat kohesi sosial dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pendekatan tata kelola berbasis budaya (*cultural governance*) menempatkan tradisi dan kelembagaan adat sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika pemerintahan masyarakat adat dan desa di Indonesia (Arniti et al., 2022; Rusli et al., 2022; El Darman, 2025).

Tradisi itu sendiri dimaknai sebagai sistem pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan norma yang diwariskan secara lintas generasi (Wagnalls & Funk, 1984). Tradisi

merupakan wujud nyata kearifan lokal yang membentuk tatanan hukum adat dan mengarahkan perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat (Muhaimin, 2017). Menurut Jamhir (2017), tatanan adat dalam kebiasaan sehari-hari menjelma menjadi adat istiadat, di mana keberagaman tata cara dan pelaksanaan upacara adat merupakan kekayaan budaya yang penting untuk dilestarikan. Dalam struktur pemerintahan lokal di Aceh, tradisi dan adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga menjadi fondasi etik yang menopang tatanan kepemimpinan.

Salah satu tradisi yang erat kaitannya dengan tata kelola *ethno-government* di Aceh adalah tradisi *Munirin Reje* pada masyarakat etnis Gayo. Berdasarkan kajian Faridayani (2017), *Munirin Reje* merupakan prosesi ritual memandikan atau menyucikan seorang *Reje* (pemimpin/kepala desa). Prosesi ini diawali dengan pengenaan pakaian kebesaran adat Gayo, pelaksanaan *peusijuek* (tepung tawar) secara adat yang dipimpin oleh *Imem Kampung* dan *Petue Edet* (Ketua Adat), serta diiringi lantunan takbir oleh kaum laki-laki dan alunan musik *Canang Gayo* oleh kaum perempuan. Dalam tatanan filosofis masyarakat Gayo, adat istiadat berfungsi sebagai penunjang syariat Islam, di mana adat mengenal suatu perbuatan berdasarkan kebiasaan baik, sementara syariat menentukan batas kebenaran dan kehalalan. Nilai utama dari pelaksanaan tradisi *Munirin Reje* adalah untuk memastikan bahwa *Reje* yang memimpin berada dalam keadaan suci secara moral dan spiritual, bersikap merakyat, serta memiliki tanggung jawab untuk memajukan kampung menuju kesejahteraan. Selain itu, ritual ini menjadi sarana menguatkan silaturahmi serta merekatkan hubungan emosional antara pemimpin dan rakyatnya.

Secara konseptual dalam antropologi budaya, tradisi dapat dibedakan menjadi tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Tradisi besar merujuk pada tradisi yang dipelihara oleh kelompok pemangku adat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap nilai filosofis warisan leluhur. Sebaliknya, tradisi kecil merupakan praktik budaya harian yang dijalankan masyarakat secara rutin tanpa perenungan simbolis yang mendalam (Sutrisno & Putri, 2021; Hidayah et al., 2023). Berdasarkan klasifikasi tersebut, ritus *Munirin Reje* di Desa Simpang Jernih dikategorikan sebagai tradisi besar. Ritus ini dirawat secara aktif oleh pemangku adat (*Sarak Opat, Reje/Geuchik, Tuha Peut, Tengku Imam*) yang memahami sakralitasnya, serta melibatkan partisipasi masif seluruh elemen masyarakat desa (*gampong*). Pelaksanaan *Munirin Reje* merangkum lima manifestasi budaya dan nilai utama: upacara adat, doa dan syukuran, gotong-royong, kebersamaan, serta interaksi sosial. Nilai gotong-royong dan kebersamaan dalam ritus ini sejajar dengan tradisi gotong-royong

masyarakat Jawa sebagai wujud pencapaian kerukunan hidup bersama (Suprayitno et al., 2018).

Secara kontekstual, Provinsi Aceh memiliki nomenklatur lokal yang khas dalam menyebut unit pemerintahan desa dan pemimpinnya. Istilah desa secara umum disebut Gampong. Adapun sebutan untuk kepala desa bervariasi bergantung pada wilayah adatnya: *Geuchik/Keuchik* digunakan di sebagian besar wilayah Aceh, Reje digunakan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah (serta wilayah kantong Gayo seperti Desa Simpang Jernih, Aceh Timur), *Datok Penghulu* di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil, serta *Pengulu* di Kabupaten Aceh Tenggara. Keberagaman istilah ini menegaskan betapa kuatnya akar *ethno-government* dalam struktur tata kelola lokal di Aceh.

Meskipun memiliki nilai strategis dalam legitimasi kepemimpinan, eksistensi tradisi Munirin Reje saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan observasi awal pada masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan tradisi Munirin Reje mengalami kemunduran yang signifikan dan tidak lagi diselenggarakan secara berkala. Pelaksanaannya sempat terhenti lama dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2023 pascapandemi COVID-19. Kondisi serupa dijumpai di wilayah dataran tinggi Gayo, seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Meskipun masyarakat mengakui Munirin Reje sebagai warisan leluhur yang berharga, tradisi ini sudah sangat jarang diakomodasi dalam tatanan kehidupan pemerintahan desa modern.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tradisi Munirin Reje berpotensi punah di masa depan jika tidak ada upaya revitalisasi dari masyarakat serta penelusuran ilmiah yang mendalam untuk mendokumentasikan dan merekonstruksi nilai-nilai filosofisnya. Kehilangan tradisi ini berarti juga kehilangan salah satu pilar identitas dan mekanisme legitimasi moral dalam *ethno-government* masyarakat Gayo. Berdasarkan latar belakang tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa studi terdahulu baru memetakan prosesi secara umum, bukan pada potensinya dalam kajian *ethno-government*, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis proses pelaksanaan tradisi Munirin Reje pada masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur; 2) mengidentifikasi nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi Munirin Reje serta keterkaitannya dengan penguatan tata kelola *ethno-government*, dan 3) merumuskan rekomendasi strategis dan langkah-langkah pelestarian guna menjamin keberlanjutan serta mencegah kepunahan tradisi Munirin Reje di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk melakukan kajian secara mendalam (Creswell & Creswell, 2018) mengenai praktik tradisi *Munirin Reje* serta makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya dari perspektif *ethno-government* (etno-pemerintahan). Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena budaya dan tata kelola lokal secara holistik dalam konteks kehidupan nyata (real-life context) (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2024 di Desa Simpang Jernih, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Secara geografis, Desa Simpang Jernih terletak pada posisi astronomis $4^{\circ}17'40''\text{LU}$ – $4^{\circ}21'30''\text{LU}$ dan $95^{\circ}44'50''\text{BT}$ – $95^{\circ}46'40''\text{BT}$, berbatasan dengan Desa Pante Kera di utara, Desa Batu Sumbang di barat, serta Desa Batu Bedulang di selatan dan timur. Desa ini memiliki luas wilayah 7.500 Ha yang terbagi ke dalam empat dusun (Dusun Jati, Dusun Pante, Dusun Semurut, dan Dusun Kekening), dengan total populasi 690 jiwa (179 KK) yang mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian serta memegang teguh tatanan adat Gayo (BPS Kabupaten Aceh Timur, 2024).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*) guna memilih subjek yang memiliki pemahaman mendalam, otoritas, dan keterlibatan langsung dalam objek kajian (Patton, 2015; Sugiyono, 2019). Informan terpilih berjumlah 15 orang pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mencakup: 1 orang Reje (pemimpin adat/kepala desa), 1 orang Ibu Reje, 2 orang *Petue* (tokoh adat), 1 orang *Tengku Imam* (tokoh agama), serta 10 orang anggota masyarakat sebagai partisipan utama upacara adat. Keterlibatan lintas pemangku kepentingan ini memberikan perspektif yang luas dan komprehensif, baik dari sudut pandang pemegang otoritas pemerintahan adat maupun warga pelaksana tradisi (Creswell & Poth, 2018).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama sesuai prinsip triangulasi data (Marshall & Rossman, 2016): wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pada tahap persiapan, puncak prosesi, dan pasca-pelaksanaan tradisi, serta dokumentasi arsip dan foto kegiatan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sebagai pengamat independen yang berinteraksi langsung dengan pemangku adat Gayo, peneliti memposisikan diri secara reflektif sebagai partisipan-pengamat (*reflexive participant-observer*) yang menghormati norma etik masyarakat tineliti, sekaligus secara sadar menjaga jarak kritis (*critical distance*) untuk menjamin objektivitas analisis, transparansi etis, dan meminimalkan bias subjektif selama proses etnografi.

Selanjutnya, analisis data dilakukan mengombinasikan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan tema-tema utama yang merepresentasikan elemen-elemen *ethno-government* dalam tradisi *Munirin Reje* pada masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Ritus dan Konsensus Sosial dalam Prosesi Munirin Reje

Masyarakat Gayo memiliki sistem adat yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup (Hurgronje, 1903). Salah satu tradisi utama yang dirawat oleh masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, adalah tradisi *Munirin Reje* (“*munirin*” berarti memandikan dan “*reje*” berarti raja/kepala desa). Tradisi ini merupakan ritus memandikan pimpinan (*Reje* dan *permaisuri*) di aliran sungai, yang didasari oleh keyakinan bahwa dosa-dosa serta beban moral pimpinan akan dihanyutkan oleh aliran air. Melalui pelaksanaan ritus ini, *Reje* yang memimpin *gampong* diharapkan berada dalam keadaan suci secara batiniah, bersikap merakyat, serta mampu mempererat hubungan sosial warga guna membawa desa menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Pelaksanaan tradisi *Munirin Reje* di Desa Simpang Jernih diawali oleh mekanisme musyawarah terstruktur yang mengukuhkan konsensus kolektif masyarakat. Inisiasi ritus dimulai dari pengumuman resmi oleh perangkat desa di masjid *gampong* pascapelantikan *Geuchik/Reje* (biasanya dilaksanakan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan atau Idul Fitri). Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan rapat umum warga untuk membentuk panitia pelaksana secara gotong royong. Penentuan waktu, pembagian kerja, hingga pengumpulan sumber daya dilakukan tanpa sanksi formal, melainkan didasari oleh kesadaran sukarela.

Dalam masa persiapan, panitia menyiapkan instrumen dan perlengkapan adat yang dibutuhkan, meliputi: *bulang pengkah* (peci tiga warna khas *Reje*), *upuh kerawang* (pakaian dan kain khas Gayo), *genit rante* (tali pinggang), *lulut* (ramuan beras dan jeruk purut), pedang, payung *renggiep* (payung kebesaran Gayo), serta *ampang* (tempat duduk kebesaran *Reje*). Dalam perspektif Émile Durkheim (2018), fase persiapan ini menggambarkan berkerjanya solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*) yang dilandasi oleh kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Masjid tidak hanya berfungsi sebagai

ruang sakral keagamaan, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat artikulasi *ethno-government* tempat konsensus politik lokal dibangun. Pembentukan panitia secara gotong royong merepresentasikan peleburan kepentingan individu ke dalam kepentingan bersama.

Rangkaian ritus Munirin Reje diselenggarakan secara terstruktur selama satu hari penuh (pukul 07.00 hingga 18.00 WIB) melalui empat tahapan seremonial yang menyelaraskan antara ritual adat dan kewajiban syariat:

Tahap Persiapan dan Peusijuek (Pukul 07.00–10.00 WIB): Ritus diawali pada pagi hari dengan agenda persiapan logistik dan memasak bersama yang melibatkan partisipasi aktif warga gampong. Selanjutnya, bertempat di rumah dinas Reje, dilakukan prosesi *peusijuek* (tepung tawar) awal. Reje beserta permaisuri mengenakan pakaian kebesaran adat (*Kerawang Gayo*) dan di-*peusijuek* oleh *Tengku Imam*, *Petue Edet*, serta tokoh perempuan adat (*Ibuk-ibuk Edet*).

Tahap Arak-Arakan dan Penyucian di Sungai (Pukul 10.00–12.00 WIB): Reje dan permaisuri dibimbing menuju sungai dengan diiringi gema takbir oleh kaum laki-laki dan alunan musik tradisional Canang Gayo oleh kaum perempuan. Di tepi sungai, perangkat desa melulur keduanya dengan ramuan *lulut* (campuran beras dan jeruk purut) serta memercikkan air. Selanjutnya, Reje dan permaisuri menceburkan diri ke dalam aliran sungai. Momen puncak terjadi saat seluruh warga yang hadir ikut masuk dan mandi bersama di sungai tersebut.

Tahap Jeda Ibadah dan Jamuan Adat (Pukul 12.00–16.00 WIB): Usai ritual di sungai, aktivitas dijeda sejenak (pukul 12.00–14.00 WIB) untuk memberi ruang bagi ibadah salat Dzuhur dan istirahat bersama. Kebersamaan warga kembali menguat melalui acara makan bersama (jamuan adat) yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB di rumah dinas Reje, yang dihadiri oleh seluruh elemen *Sarak Opat*, Sekretaris Desa, Imum Mukim, tokoh pemuda, dan warga desa.

Tahap Pembersihan dan Penutup (Pukul 16.00–18.00 WIB): Setelah menunaikan ibadah salat Asar (pukul 16.00–16.30 WIB), seluruh rangkaian ritus diakhiri dengan aksi gotong royong pembersihan lokasi acara hingga selesai pada pukul 18.00 WIB.

Pembagian alokasi waktu yang menyelaraskan ritual adat, kewajiban syariat, dan kerja bakti kolektif ini membuktikan bahwa Munirin Reje dirancang secara integratif untuk merawat keharmonisan serta memperkuat solidaritas mekanis masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih.



Gambar 1. Prosesi peusijuek oleh Tengku Imam

Secara teoritis, prosesi peusijuek oleh Tengku Imam (Gambar 1) dan Ibuk-ibuk Edet diyakini menjadikan Reje dan permaisuri memiliki hati yang bersih sebelum memimpin. Menggunakan kerangka analisis Clifford Geertz (1992), kebudayaan beroperasi sebagai sistem konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik untuk mengomunikasikan serta melanggengkan sikap manusia terhadap kehidupan. Ritual keagamaan memiliki dua fungsi sekaligus: "model dari" (*model of*) realitas dan "model untuk" (*model for*) realitas (Geertz, 1992). Ritual peusijuek mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin harus suci secara spiritual (*model of*), sekaligus menjadi pedoman bahwa setiap pemimpin wajib menjalani pembersihan hati sebelum memangku jabatan (*model for*). Makna simbolis dalam *peusijuek* meliputi air dan ramuan sebagai simbol pembersihan jiwa dari noda dan dosa; penggunaan bilangan ganjil (3, 5, 7, atau 9) sebagai simbol kesempurnaan; serta pelibatan imam dan tokoh adat sebagai bentuk legitimasi kolektif atas kepemimpinan. Dengan demikian, *peusijuek* merupakan mekanisme kultural untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlandaskan nilai spiritualitas dan keadilan.

Prosesi pemandian di sungai diawali secara simbolis oleh beberapa tokoh masyarakat dengan menuangkan sedikit air menggunakan gayung ke atas kepala Reje dan permaisuri, termasuk oleh Ibuk Edet (Gambar 2). Setelah isyarat penyucian ini, Reje dan permaisuri melompat ke dalam sungai, lalu disusul oleh warga yang ikut mandi bersama untuk secara kolektif membersihkan hati dan jiwa penduduk desa. Sebelum rombongan dibimbing ke sungai, prosesi ini diselingi dengan pertunjukan kesenian Gayo, yaitu tari Saman dan tari Bines (Faridayani, 2017).



Gambar 2. Ibuk Edet menuangkan air pada Reje dan permaisuri.

Secara kultural, masyarakat Desa Simpang Jernih memelihara keyakinan kuat bahwa pengabaian tradisi Munirin Reje akan mendatangkan ancaman disintegrasi, seperti keretakan hubungan antarwarga, ketidakharmonisan lingkungan, hingga ketidaksuburan tanaman pertanian. Keyakinan metafisik ini beroperasi sebagai mekanisme kontrol sosial dan kohesi sosial informal. Kepercayaan akan keseimbangan antara tatanan sosial dan alam ini sejalan dengan nilai-nilai dalam tradisi para pade, di mana prinsip keagamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan keharmonisan lingkungan bersifat konstan serta mengalir dalam berbagai konteks kebudayaan (Yusuf et al., 2025).

Secara eksplisit, pelaksanaan Munirin Reje mentransmisikan pilar-pilar nilai kearifan lokal yang terartikulasi ke dalam tiga dimensi utama (Wiediharto et al., 2020): *Pertama*, nilai kerja sama dan gotong royong, tercermin dari ketekunan warga dalam mempersiapkan hingga menyelesaikan upacara. Solidaritas kolektif ini mendorong pengalihan kepentingan pribadi/kelompok demi kepentingan umum, sehingga pembauran sumber daya warga menghasilkan kemanfaatan bersama. *Kedua*, nilai hubungan sosial, di mana ritus ini memupuk kepedulian antarwarga, memperkuat rasa kebersamaan, serta mengokohkan fondasi sosial yang mempersatukan komunitas. Dan *ketiga*, nilai keagamaan dan moral, di mana adat Gayo memegang teguh norma dan ajaran Islam, sehingga Munirin Reje diposisikan sebagai manifestasi nilai spiritual, moral, dan estetika budaya yang luhur dalam menopang tata kelola *ethno-government* di pedalaman Aceh Timur.

3.2. Hermeneutika Simbolik Artefak dan Kesenian dalam Munirin Reje

Dalam tradisi Munirin Reje, artefak adat dan seni pertunjukan yang dihadirkan bukanlah sekadar atribut visual atau hiburan pelengkap, melainkan struktur simbolis yang kaya akan makna filosofis. Menggunakan pendekatan hermeneutika simbolik Clifford Geertz (1992), kebudayaan beroperasi sebagai sistem makna terstruktur yang terwujud dalam bentuk simbol-simbol. Dalam kerangka ini, seluruh perangkat dan tahapan ritus Munirin Reje berfungsi secara simultan sebagai *model of reality* (merepresentasikan gambaran ideal tatanan sosial-kultural masyarakat Gayo) sekaligus *model for reality* (menjadi cetak biru dan kompas etik bagi seorang Reje dalam menjalankan tata kelola pemerintahan).

Di antara seluruh rangkaian ritus, air sungai memegang posisi simbolis paling sentral. Van Schie (2008) mengaitkan air yang jernih dan mengalir dengan simbolisme spiritual yang dalam, di mana air bersih tidak sekadar melepaskan dahaga fisik, melainkan disucikan maknanya menjadi instrumen untuk membasuh jiwa dari cela dan dosa. Makna spiritual ini bersifat universal dan terinternalisasi dalam kosmologi kebudayaan lokal di Aceh, seperti terekam dalam tradisi *rajah seumapa (balek kunyet)* di Desa Ie Buboh, Aceh Selatan (Mirna et al., 2025). Secara khusus pada masyarakat Gayo, Snouck Hurgronje (1903) telah mencatat pentingnya ritual pembersihan (*peusijuek*) dan penghormatan terhadap air sebagai elemen sakral. Catatan historis tersebut menegaskan bahwa posisi Reje tidak hanya bersifat administratif-birokratis, melainkan memiliki dimensi sakral dan moral yang wajib dirawat secara ritual.

Konstruksi teoretis dan historis ini terartikulasi secara presisi dalam pelaksanaan Munirin Reje di Desa Simpang Jernih. Air mengalir yang membas tubuh Reje dari hulu ke hilir memodelkan kepercayaan masyarakat bahwa cela, kekhilafan, dan "dosa-dosa politik kepemimpinan" harus diluruhkan secara terbuka. Ramuan *lulut* (campuran beras dan jeruk purut) bertindak sebagai instrumen pembersih kiasan (purification agent) yang mengikis noda moral sebelum tubuh sang pimpinan dibasuh air sungai. Dalam konteks *ethno-government*, prosesi pemandian terbuka di sungai ini merupakan artikulasi dari transparansi dan akuntabilitas moral: seorang pimpinan harus bersedia "ditelanjangi" dari kesombongan jabatan dan disucikan kembali oleh serta di hadapan rakyatnya guna memastikan ia kembali memimpin dengan hati yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Selain elemen air dan lulut, atribut fisik yang dikenakan Reje dan permaisuri sarat akan simbolisme filosofis yang memagari otoritas kekuasaan, yakni: *Bulang Pengkah* (Peci Tiga Warna) melambangkan tiga pilar ketahanan moral, hukum adat, dan nilai

keagamaan (*Sarak Opat*) yang menyatu dalam kepemimpinan Reje; *Upuh Kerawang Gayo* yang mewakili identitas kolektif, kemegahan kultural, dan batas-batas etis yang memagari tindakan pimpinan agar tidak berbuat sewenang-wenang; serta *Pedang*, *Payung Renggiep*, dan *Ampang* untuk mengukuhkan posisi Reje sebagai pelindung rakyat. Kekuatan dan ketegasan (*pedang*) harus senantiasa berada di bawah naungan keadilan, kearifan, serta kerendahan hati (*payung renggiep* dan tempat duduk kebesaran *ampang*).



Gambar 3. Para penari Bines

Puncak dari artikulasi simbolik sebelum penyucian di sungai ditegaskan melalui pertunjukan tari Bines yang dibawa oleh kaum perempuan. Spektrum warna busana penari Bines memiliki makna simbolis mendalam (Gambar 3), yakni warna merah melambangkan keberanian, semangat, dan ketegasan, yang memuat pesan bahwa seorang Reje harus berani mengambil keputusan dan tegas dalam menegakkan keadilan; warna kuning/emas yang melambangkan kemuliaan, keagungan, dan status sosial yang tinggi, yang mengingatkan bahwa Reje adalah sosok yang dimuliakan sehingga wajib menjaga martabat perilakunya; dan warna hijau yang melambangkan kesuburan, kedamaian, dan keberkahan, yang memuat harapan agar kepemimpinan Reje membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Desa Simpang Jernih.

Sambil menari, para perempuan mengumandangkan lirik-lirik lagu adat yang sarat akan kritik sosial dan nasihat pemerintahan. Lirik tari Bines mengeksplisitkan prinsip kepemimpinan yang adil, responsif terhadap aspirasi dari bawah, serta memuat larangan keras memprioritaskan kepentingan pribadi atau keluarga (sikap anti-nepotisme). Tari Bines dengan demikian bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial *bottom-up* sebagai sebuah saluran suara kritis warga (khususnya kaum perempuan) yang dibingkai secara elegan dalam ruang estetika adat untuk mengingatkan Reje akan sumpah jabatannya.

Selain itu, secara kritis, pelaksanaan peusijuek yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni sebelum dan sesudah prosesi pemandian, memiliki diferensiasi fungsi simbolis yang mendasar. Peusijuek pertama berfungsi sebagai fase persiapan (*preparatory stage*) untuk menyucikan serta menyiapkan Reje dan permaisuri secara spiritual sebelum memasuki sungai. Sementara itu, peusijuek kedua berfungsi sebagai fase pengesahan (*ratification stage*) untuk menegaskan bahwa prosesi penyucian telah tuntas dan Reje telah resmi menyanggah kesucian moral. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembersihan fisik dan spiritual melalui aliran air sungai tidak berdiri sendiri, melainkan tetap membutuhkan legitimasi langsung dari aparat adat dan tokoh agama.

Dalam perspektif hermeneutika kritis, praktik peusijuek ganda ini bekerja mereproduksi otoritas sosial-keagamaan dalam struktur gampong. Ritual ini secara eksklusif dipimpin oleh Tengku Imam (otoritas keagamaan), perangkat desa (otoritas adat), dan tokoh masyarakat (otoritas sosial). Meskipun Reje menduduki posisi puncak kepemimpinan formal, ia tetap tunduk pada hierarki kultural yang dipegang oleh para pemangku adat dan agama. Ritus ini berfungsi sebagai pertunjukan budaya (*cultural performance*) yang memproduksi legitimasi kepemimpinan sekaligus menghadirkan ketenangan emosional kolektif bagi masyarakat, yakni memberikan kepastian bahwa pemimpin mereka telah disucikan secara adat dan syariat.

3.3. Ethno-Government, Kontrol Sosial, dan Legitimasi Hibrida

Dalam perspektif antropologi budaya kontemporer, kebudayaan dipahami sebagai sistem makna dan simbol yang diwariskan secara sosial serta menjadi landasan masyarakat dalam memahami kehidupan, termasuk dalam praktik kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam konteks pemerintahan lokal, kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk pola pengambilan keputusan, menjaga keteraturan sosial, serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Nilai-nilai lokal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial (*bottom-up control*) karena telah melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendekatan *ethno-government* menempatkan kearifan lokal sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis masyarakat dan budaya lokal (Haba, 2021; Sulaiman et al., 2022; Prasetyo & Nugroho, 2023).

Implementasi pendekatan *ethno-government* ini terartikulasi secara nyata dalam pertunjukan tarian tradisional Bines yang dibawakan oleh kaum perempuan dalam prosesi penyucian Reje dan permaisuri di Desa Simpang Jernih. Tarian ini bukan

sekadar hiburan visual, melainkan sarana simbolis untuk menyampaikan pesan etika dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Nyanyian yang mengiringi tarian Bines mengingatkan Reje akan perannya sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Pesan lirik tersebut menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, musyawarah, serta keberpihakan pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau keluarga (prinsip anti-nepotisme).

Prinsip musyawarah yang tersirat dalam nyanyian tari Bines menegaskan pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif dalam tata kelola *ethno-government*. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kebijakan yang dihasilkan oleh Reje akan lebih mewakili kebutuhan kolektif. Melalui kritik sosial yang dikemas secara estetis dalam tari Bines, Reje dihadapkan pada nilai-nilai demokrasi lokal dan partisipasi publik dari kalangan perempuan sebelum ia menerima legitimasi kepemimpinan secara utuh.

Dalam tata kelola pemerintahan desa kontemporer di Aceh, posisi pimpinan desa (*Geuchik/Reje*) sering kali dihadapkan pada benturan antara regulasi birokrasi negara yang teknokratis dan tuntutan adat yang bersifat emosional-spiritual. Penelitian di Desa Simpang Jernih ini menunjukkan bagaimana tradisi Munirin Reje berhasil menjembatani dikotomi tersebut melalui pembentukan legitimasi hibrida (*hybrid legitimacy*) yang mengokohkan bangunan *ethno-government*. Dalam lingkungan masyarakat adat, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh prosedur administratif formal, melainkan juga oleh pengakuan masyarakat terhadap kapasitas sosial, kultural, dan simbolik pemimpinnya (Bowen, 2003).

Mengacu pada tipologi otoritas Max Weber (1978), legitimasi kekuasaan terbagi menjadi tiga bentuk: rasional-legal, tradisional, dan karismatik. Dalam konteks kepemimpinan Reje di Desa Simpang Jernih, ketiga tipe legitimasi ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan menyatu secara dinamis melalui panggung ritual Munirin Reje:

Pertama, otoritas Rasional-Legal: Reje memperoleh legitimasi formal dari hukum positif negara melalui pemilihan kepala desa (*Geuchik*) dan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah. Namun, legitimasi legal-formal ini bersifat administratif dan rentan kehilangan keabsahan sosiologis jika pimpinan terasing dari tradisi warga.

Kedua, otoritas Tradisional: Melalui ritual Munirin Reje, posisi *Geuchik* (Kepala Desa) disublimasi menjadi *Reje* (raja adat). Pengakuan ini diberikan oleh kelembagaan adat *Sarak Opat* (*Reje*, *Petue*, *Imum*, dan *Rayat*). Ritus ini menegaskan bahwa kekuasaan

yang dipegang merupakan kelanjutan dari tatanan hukum adat Gayo yang diwariskan secara lintas generasi.

Ketiga, otoritas Karismatik dan Moral: Melalui prosesi peusijuek oleh Tengku Imam dan tokoh adat, serta ritual pemandian di sungai, Reje memperoleh penyucian moral dan spiritual. Kesucian batin yang diyakini warga melahirkan kewibawaan karismatik, di mana kepatuhan warga tidak lagi didorong oleh rasa takut pada sanksi hukum negara, melainkan oleh rasa hormat (segan) terhadap integritas moral pimpinan.

Integrasi seluruh elemen pemerintahan tersebut, mulai dari Sarak Opat, Sekretaris Desa, Imum Mukim, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum, dalam ritual ini membuktikan bahwa *ethno-government* di Desa Simpang Jernih bekerja secara inklusif. Munirin Reje bertindak sebagai sarana re-legitimasi publik. Dalam tatanan ini, efektivitas kebijakan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana seorang Reje mampu menjaga kesucian moral dan kepemimpinan yang berlandaskan kearifan lokal. Ketika legitimasi rasional-legal ditopang oleh kesucian spiritual dari tradisi lokal, stabilitas pemerintahan desa dapat terwujud secara harmonis tanpa gejolak sosial yang berarti.

Upacara adat Munirin Reje tidak sekadar diposisikan sebagai panggung seremonial formal, melainkan dihayati sebagai konstruksi simbolis tata kelola kepemimpinan dan wujud penghormatan kolektif masyarakat gampong terhadap pemimpinnya. Ritus ini bertindak sebagai jembatan yang memperkuat ikatan kepercayaan, kebersamaan, dan pengakuan sosial antara Reje dan rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh Hobsbawm dan Ranger (1983), tradisi berfungsi efektif sebagai instrumen untuk mengesahkan legitimasi kekuasaan sekaligus media komunikasi politik-kultural antara pemimpin dan masyarakat. Fungsi ini beririsan dengan pemikiran Durkheim (2018), di mana tradisi mampu memperkokoh integrasi sosial serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan pemerintahan lokal berbasis kearifan lokal (*ethno-government*).

Dimensi integratif ini terwujud secara nyata usai prosesi penyucian di sungai, di mana seluruh rangkaian acara dilanjutkan dengan silaturahmi dan makan bersama di rumah dinas Reje. Acara ini dihadiri secara inklusif oleh Imem Kampung, Imum Mukim, perangkat desa, para Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kecamatan Simpang Jernih, tokoh adat, kelompok pemuda, hingga warga masyarakat umum. Momentum jamuan adat ini merekatkan tali silaturahmi pada empat tingkatan sosiologis, yakni tingkat Birokrasi Adat (hubungan antara Reje dengan jajaran bawahannya), tingkat

Kewilayahan (hubungan antar-kejurun atau kelompok masyarakat berbasis lorong/wilayah), tingkat Kekerabatan dan Tokoh (hubungan antar-cik/tokoh orang tua yang dituakan dalam struktur sosial gampong), dan tingkat Komunitas Komprehensif (hubungan inklusif antara pemangku struktur desa dengan seluruh warga yang hadir).

Sinergi dan gotong royong antar-generasi, dengan keterlibatan aktif kaum muda dan tokoh tua, dalam menyukseskan jamuan adat ini memiliki kesamaan fungsi sosiologis, misalnya, dengan pelaksanaan tradisi *Nyadran*, di mana kebersamaan intergenerasi menjadi kunci utama kelancaran ritus dan penguatan kohesi komunitas (Anam, 2017). Melalui keberlanjutan tradisi Munirin Reje, masyarakat Desa Simpang Jernih tidak hanya merawat identitas kultural sebagai suku Gayo yang kaya akan nilai-nilai luhur, tetapi juga mengukuhkan *ethno-government* sebagai ruang hidup yang menjaga keharmonisan sosial, moralitas kepemimpinan, serta stabilitas tatanan hidup bersama di pedalaman Aceh Timur.

3.4 Ketahanan Kultural dan Tantangan Keberlanjutan Tradisi

Pewarisan tradisi Munirin Reje pada masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih berlangsung melalui transmisi genealogis dan kultural yang berjenjang. Meskipun asal-usul historis penanggalan awalnya belum teridentifikasi secara pasti, dan hingga kini masih terus ditelusuri oleh perangkat desa, masyarakat setempat mengenali alur pewarisan ini secara terstruktur. Tradisi ini diturunkan dari *Muyang* (leluhur/nenek moyang tertinggi), berlanjut ke *Datu* (buyut), diturunkan ke *Awan* (kakek), dilanjutkan oleh *Ama* (ayah), hingga akhirnya diwariskan kepada generasi penerus masa kini. Alur genealogis yang runtut ini menunjukkan bahwa Munirin Reje beroperasi sebagai memori kolektif yang mengikat kesadaran sejarah dan identitas kultural warga secara turun-temurun. Dalam tatanan sosial, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana tradisi yang dirawat secara antargenerasi menjadi ukuran nilai dan pedoman bertindak bagi komunitas pemiliknya (Afriansyah & Sukmayadi, 2022; Nurmansyah et al., 2019).

Namun demikian, pelaksanaan tradisi Munirin Reje di Desa Simpang Jernih saat ini berada pada persimpangan antara dinamika modernitas dan upaya merawat warisan leluhur. Berdasarkan penuturan Petue Desa Simpang Jernih, ritus ini telah mengalami pergeseran frekuensi pelaksanaan yang cukup signifikan. Ritus yang dulunya diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai resam bernilai sakral, kini tidak lagi dilaksanakan secara berkala. Pergeseran ini dipengaruhi oleh penetrasi

modernisasi, tingginya alokasi biaya logistik upacara adat, serta dominasi prioritas Dana Desa untuk pembangunan fisik teknokratis. Ketidakpastian pelaksanaan ini makin diperparah oleh disrupsi eksternal seperti pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan ritus secara total sebelum akhirnya diselenggarakan kembali pada tahun 2023.

Secara kultural-geografis, fenomena ini memperlihatkan dinamika yang menarik pada masyarakat Gayo lintas wilayah. Berbeda dengan masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih (Kabupaten Aceh Timur) yang konsisten mempertahankan eksistensi Munirin Reje, tradisi ini justru dilaporkan mulai redup di pusat kebudayaan Gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Meskipun faktor spesifik di balik meredupnya ritus di wilayah pusat kebudayaan tersebut belum teridentifikasi secara pasti, fenomena ini menandai adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diungkap melalui kajian etnografis lanjutan di masa depan.

Uniknya, keberlanjutan tradisi Munirin Reje di Desa Simpang Jernih tidak ditopang oleh mekanisme sanksi hukum atau denda adat bagi warga yang tidak hadir. Kepatuhan dan partisipasi masyarakat didasari oleh kesadaran sukarela, kehormatan kolektif, dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap warisan leluhur. Pendekatan non-sanksi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan sosial, di mana pemeliharaan tradisi dijalankan atas dasar kesepakatan moral serta kecintaan terhadap identitas budaya gampong.

Dalam konteks ketahanan kultural (*cultural resilience*), Munirin Reje berperan vital sebagai benteng pelindung tatanan sosial dari arus globalisasi. Sebagaimana dikemukakan Njatrijani (2018), kearifan lokal berfungsi sebagai filter kultural (*cultural filter*) yang menyaring dan mengintegrasikan unsur luar secara selektif tanpa merusak nilai-nilai inti (*core values*) sebuah komunitas. Melalui keterlibatan aktif warga, ritus ini memperkuat solidaritas sosial dan menyediakan media pembelajaran moralitas kepemimpinan bagi generasi muda (Rahman & Putri, 2021; Hidayat et al., 2023), yang akar sejarahnya telah diabadikan oleh Snouck Hurgronje (1903). Keberadaan Munirin Reje memiliki kesamaan komparatif, misalnya, dengan kearifan lokal *Smong* di Simeulue yang ditransmisikan secara lisan melalui pertunjukan *Nandong* untuk merawat ingatan kolektif warga (Ramli et al., 2024).

Kendati demikian, tantangan erosi budaya tetap mengintai akibat risiko alienasi generasi muda yang makin terpengaruh arus budaya populer. Oleh karena itu, keberlanjutan Munirin Reje tidak boleh lagi disandarkan belaka pada ingatan lisan generasi tua, melainkan membutuhkan langkah transformatif. Diperlukan strategi

adaptasi melalui peningkatan kesadaran kultural generasi muda (melalui keterlibatan aktif dalam kepanitiaan) serta reorientasi kebijakan pemerintahan desa. Pemerintah desa bersama Sarak Opat perlu mengintegrasikan agenda pelestarian tradisi adat ke dalam dokumen perencanaan resmi (RPJM Desa dan RKP Desa) dengan dukungan penganggaran legal dari skema Dana Desa (Putra & Wahyuni, 2021; Sulaiman et al., 2023). Kebudayaan pada hakikatnya bersifat dinamis; penyesuaian mekanisme ritus terhadap tuntutan zaman tanpa mengorbankan substansi nilai sakralnya akan memastikan Munirin Reje tetap berfungsi efektif sebagai instrumen ethno-government, pemurni moral kepemimpinan, dan perekat kohesi sosial masyarakat Gayo hingga masa depan.

4. SIMPULAN

Upacara adat Munirin Reje pada masyarakat Gayo di Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, merupakan ritus memandikan pimpinan desa (Reje/Geuchik) beserta permaisuri yang diselenggarakan pascapelantikan formal dan sebelum Hari Raya Idulfitri. Tradisi ini dihayati sebagai memori kolektif dan warisan genealogis leluhur yang dipertahankan secara lintas generasi. Secara komprehensif, simpulan penelitian ini terartikulasi ke dalam tiga pilar utama:

Pertama, Konstruksi dan Hermeneutika Ritus. Pelaksanaan ritus diawali dengan pergelaran tari Bines sebagai media komunikasi kultural, dilanjutkan prosesi peusijuek pertama sebagai fase persiapan (*preparatory stage*), ritual pemandian di aliran sungai yang menyimbolkan peluruhan cela serta "dosa-dosa politik kepemimpinan", dan diakhiri dengan peusijuek kedua sebagai fase pengesahan (*ratification stage*) atas kesucian batin pimpinan.

Kedua, Dimensi Ethno-Government dan Legitimasi Hibrida. Ditinjau dari perspektif ethno-government, Munirin Reje bertindak sebagai instrumen integrasi yang menyatukan legitimasi rasional-legal, tradisional, dan spiritual/moral (hybrid legitimacy). Ritus ini berfungsi sebagai media komunikasi politik-kultural serta mekanisme kontrol sosial bottom-up yang efektif untuk menanamkan nilai keagamaan, gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, serta menegaskan prinsip keadilan dan sikap anti-nepotisme dalam tata kelola pemerintahan gampong.

Dan *ketiga*, Tantangan Kultural dan Keberlanjutan Tradisi. Keberlangsungan tradisi ini di era modern dihadapkan pada ancaman erosi kultural. Tantangan utama tersebut meliputi penurunan frekuensi penyelenggaraan yang dipicu oleh keterbatasan alokasi anggaran logistik, minimnya pemahaman filosofis di sebagian

lapisan masyarakat, pesatnya penetrasi modernisasi, serta potensi alienasi kultural di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu, keberlanjutan Munirin Reje memerlukan langkah transformatif berupa reorientasi kebijakan desa melalui pengintegrasian agenda adat ke dalam dokumen perencanaan resmi (RPJM Desa dan RKP Desa) dan skema Dana Desa, serta pelibatan aktif generasi muda guna menjaga eksistensi tradisi ini sebagai pemurni moral kepemimpinan dan perekat kohesi sosial masyarakat Gayo di pedalaman Aceh Timur.

REFERENSI

- Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Laut dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan Ratu. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 38–54. <https://doi.org/10.23917/sosial.v3i1.549>
- Anam, C. (2017). Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan. *Sabda*, 12(1), 77–84.
- Arniti, N. K., Yuliani, I., Irawan, B., Hidayat, H., & Zahidah, A. (2022). Public Administration from a Local Wisdom Perspective. *International Journal of Demos*, 4(4), 1345–1361. <https://doi.org/10.37950/ijid.v4i4.382>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- BPS Kabupaten Aceh Timur. (2024). Kecamatan Simpang Jernih dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Ed. ke-5). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Ed. ke-4). SAGE Publications.
- Digdoyo, E. (2015). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Ghalia Indonesia.
- Durkheim, E. (2018). The Division of Labor in Society. Dalam *Social Stratification* (hlm. 217–222). Routledge.
- El Darman, A. A. (2025). The Role of Customary Institutions in Supporting Local Governance in West Sumatra. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 221–228. <https://doi.org/10.55850/simbol.v4i2.242>
- Faridayani. (2017). Tradisi Munirin Reje Di Masyarakat Gayo Lukup Serbejadi Kabupaten Aceh Timur [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].

Repository UIN Ar-Raniry.

Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius.

Haba, J. (2021). Kearifan Lokal dalam Tata Kelola Pemerintahan Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 155–168. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.2021>

Hidayah, N., Pratama, R., & Siregar, M. (2023). Transformasi Tradisi Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Modern. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 15(1), 55–67. <https://doi.org/10.24815/jkm.v15i1.2023>

Hidayat, M., Nugroho, A., & Sari, D. (2023). Tradisi dan Pewarisan Nilai Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Lokal. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 66–78. <https://doi.org/10.31289/jsh.v14i1.2023>

Hurgronje, C. S. (1903). *Het Gajoland en Zijne Bewoners*. Landsdrukkerij.

Jamhir. (2017). Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 45–58.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research* (Ed. ke-6). SAGE Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Ed. ke-2). SAGE Publications.

Mirna, L., Gadeng, A. N., Azis, D., Ruliani, & Kamza, M. (2025). Tradisi Ritual Rajah Seumapa (Balek Kunyet) Sebagai Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Ie Buboh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. *Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 5(2), 45–58. <https://doi.org/10.30631/y99a7y63>

Muhaimin. (2017). *Tradisi*. PT. Logos Wacana Ilmu.

Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal dan Kedudukannya dalam Hukum Nasional. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–34. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>

Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Ed. ke-4). SAGE Publications.

Prasetyo, A., & Nugroho, D. (2023). Local Wisdom and Community-Based Governance in Indonesian Traditional Societies. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 44–56. <https://doi.org/10.22146/jsp.2023.78901>

Putra, R., & Wahyuni, S. (2021). *Perubahan Sosial dan Dinamika Budaya Masyarakat*

- Lokal di Era Modernisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 45–56.
<https://doi.org/10.31289/jsh.v13i1.2021>
- Rahman, F., & Putri, N. (2021). Peran Tradisi dalam Mempertahankan Identitas dan Nilai Budaya Masyarakat. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 6(2), 89–101.
<https://doi.org/10.24815/jkn.v6i2.2021>
- Ramli, Gadeng, A. N., Azis, D., Yusuf, Y. Q., & Razali. (2024). The Role of Oral Traditions in Internalizing Smong Wisdom: Perspectives from the Simeulue Community. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 14(2), 229–239.
<https://doi.org/10.17509/ijal.v14i2.74903>
- Ranger, T. O., & Hobsbawm, E. J. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Rusli, H., Mukhlis, M., Samad, I. A., & Nuthihar, R. (2022). Hikayat Pocut Muhammad: Konsep Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal. *Indonesian Language Education and Literature*, 8(1), 112–125. <https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.11411>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, M., Fitriani, R., & Akmal, T. (2022). Peran Kearifan Lokal dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 201–214.
<https://doi.org/10.31289/jap.v18i3.2022>
- Sulaiman, M., Hasanah, N., & Rizky, A. (2023). Dinamika Kebudayaan dan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Tradisional. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(2), 120–132. <https://doi.org/10.7454/jai.v44i2.2023>
- Suprayitno, E., Rois, S., Harmanto, B., & Iman, N. (2018). Representasi Falsafah Jawa dalam Cerita Rakyat “Terjadinya Terowongan Air Mangge”. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(2), 185–198. <https://doi.org/10.26499/madah.v9i2.813>
- Sutrisno, A., & Putri, D. (2021). Pelestarian Tradisi dan Identitas Budaya pada Masyarakat Lokal Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 18(2), 101–112.
<https://doi.org/10.24014/jsb.v18i2.2021>
- Van Schie, G. (2008). *Hubungan Manusia dengan Misteri Segala Misteri: Rahasia di Balik Kehidupan* (W. David, Ed.). Fidei Press.
- Wagnalls, F., & Funk, P. (1984). *Funk & Wagnalls Standard Dictionary*. New American Library.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Wiediharto, A., Sukmaningrum, A., & Lestari, P. (2020). *Kepemimpinan Tradisional dan Legitimasi Sosial Masyarakat Adat*. Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Ed. ke-6). SAGE Publications.

Yusuf, L. D., Hidayat, F. N., & Mudhee, K. H. (2025). Internalization of National Character Values through Islamic Religious Education. *International Journal of Applied Educational Research (IJAER)*, 3(3), 191–198.
<https://doi.org/10.59890/ijaer.v3i3.63>

This page is intentionally left blank